

ABSTRAK DOKUMEN SNI

Untuk mendapatkan SNI Bidang Informasi Geografis / Geomatika dapat menghubungi:

Sekretariat Pantek 07-01 Bidang Informasi Geografis / Geomatika

Pusat Sistem Jaringan dan Standardisasi Data Spasial

Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)

Jl. Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong 16911

Telp. (+62) 21 8753407

Fax. (+62) 21 8753366

Email: pantek211s@bakosurtanal.go.id

- SNI 19-6502.1-2000

Spesifikasi Teknis Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:10.000

Abstrak:

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) yang dalam hal ini bertugas dan berfungsi sebagai pembuat peta untuk seluruh Indonesia berkewajiban untuk membuat standarisasi peta sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dari Badan Standardisasi Nasional (BSN). Untuk itu Bakosurtanal menerbitkan standar nasional ini sebagai hasil dari spesifikasi di dalam pembuatan Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 10.000.

Standar Nasional Indonesia ini dilaksanakan untuk mendukung persiapan dalam menjalankan otonomi daerah yang telah dituangkan dalam Undang-undang No. 22, Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 10, Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta dan Perencanaan Tataruang Nasional.

- SNI 19-6502.2-2000

Spesifikasi Teknis Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:25.000

Abstrak:

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) yang dalam hal ini bertugas dan berfungsi sebagai pembuat peta untuk seluruh Indonesia berkewajiban untuk membuat standarisasi peta sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dari Badan Standardisasi Nasional (BSN). Untuk itu Bakosurtanal menerbitkan standar nasional ini sebagai hasil dari spesifikasi di dalam pembuatan Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000.

Standar Nasional Indonesia ini dilaksanakan untuk mendukung persiapan dalam menjalankan otonomi daerah yang telah dituangkan dalam Undang-undang No. 22, Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 10, Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta dan Perencanaan Tataruang Nasional.

- SNI 19-6502.3-2000

Spesifikasi Teknis Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:50.000

Abstrak:

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) yang dalam hal ini bertugas dan berfungsi sebagai pembuat peta untuk seluruh Indonesia berkewajiban untuk membuat standarisasi peta sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dari Badan Standardisasi Nasional (BSN). Untuk itu Bakosurtanal menerbitkan standar nasional ini sebagai hasil dari spesifikasi di dalam pembuatan Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 50.000.

Standar Nasional Indonesia ini dilaksanakan untuk mendukung persiapan dalam menjalankan otonomi daerah yang telah dituangkan dalam Undang-undang No. 22,

Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 10, Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta dan Perencanaan Tataruang Nasional.

- **SNI 19-6502.4-2000**

Spesifikasi Teknis Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:250.000

Abstrak:

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) yang dalam hal ini bertugas dan berfungsi sebagai pembuat peta untuk seluruh Indonesia berkewajiban untuk membuat standarisasi peta sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dari Badan Standardisasi Nasional (BSN). Untuk itu Bakosurtanal menerbitkan standar nasional ini sebagai hasil dari spesifikasi di dalam pembuatan Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 250.000.

Standar Nasional Indonesia ini dilaksanakan untuk mendukung persiapan dalam menjalankan otonomi daerah yang telah dituangkan dalam Undang-undang No. 22, Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 10, Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta dan Perencanaan Tataruang Nasional.

- **SNI 19-6724-2002**

Jaring Kontrol Horizontal

Abstrak:

Jaring kontrol horizontal merupakan sekumpulan titik kontrol horizontal yang satu sama lainnya dikaitkan dengan data ukuran jarak dan/atau sudut, dan koordinatnya ditentukan dengan metode pengukuran/pengamatan tertentu dalam suatu sistem referensi koordinat horizontal tertentu.

Standar ini meliputi ruang lingkup, istilah dan definisi, klasifikasi, konvensi, dan spesifikasi teknis dari pembangunan dan pengembangan jaring titik kontrol geodetik horizontal nasional.

- **SNI 19-6725-2002**

Peta Lingkungan Bandar Udara Indonesia Skala 1:25.000

Abstrak:

SNI tentang Peta lingkungan bandar udara Indonesia (LBI) skala 1:25 000 ini merupakan usaha untuk menyeragamkan pembuatan peta LBI dan mempermudah bagi para pemakai dalam membaca dan memahami unsur-unsur data dan informasi yang tertuang dalam peta LBI.

Standar ini merupakan panduan dan pedoman untuk memproduksi peta Lingkungan Bandar Udara Indonesia (LBI) skala 1:25000, yang meliputi aturan umum, unsur-unsur yang harus/perlu disajikan, cara penyajian dan reproduksi peta.

- **SNI 19-6726-2002**

Peta Dasar Lingkungan Pantai Indonesia Skala 1:50.000

Abstrak:

Standar Nasional Indonesia ini merupakan usaha realisasi program jangka panjang dalam pembuatan peta dasar LPI seluruh wilayah pantai Indonesia skala 1:50.000 sebanyak lebih kurang 1200 Nomor Lembar Peta (NLP). Pedoman ini merupakan salah satu realisasi penyediaan standar nasional untuk pembuatan peta dasar LPI. Standar ini meliputi ketentuan, unsur-unsur yang harus/perlu disajikan, cara penyajian dan reproduksi peta dasar lingkungan pantai Indonesia skala 1:50 000. Tujuan pedoman ini adalah untuk menyajikan spesifikasi yang standar tentang pembuatan peta dasar Lingkungan Pantai Indonesia skala 1:50 000 bertaraf nasional.

- **SNI 19-6727-2002**

Peta Dasar Lingkungan Pantai Indonesia Skala 1:250.000

Abstrak:

Standar Nasional Indonesia tentang Peta dasar lingkungan pantai Indonesia skala 1:250.000 ini menyajikan spesifikasi tentang pembuatan peta dasar LPI skala 1:250.000 bertaraf nasional. Standar ini meliputi ketentuan, unsur-unsur yang harus/perlu disajikan, cara penyajian dan reproduksi peta dasar lingkungan pantai Indonesia (LPI) skala 1:250.000.

- **SNI 19-6728.1-2002**

Penyusunan Neraca Sumber Daya – Bagian 1: Sumber Daya Air Spasial

Abstrak:

Standar Nasional Indonesia ini merupakan penyempurnaan dari petunjuk teknis neraca sumber daya air yang dihasilkan pada tahun 1991 dan telah beberapa kali di revisi terakhir kali pada tahun 2001. Penyusunan neraca sumber daya air di latar belakang oleh kenyataan bahwa pembangunan yang selama ini dilaksanakan belum memperhitungkan dampak samping dari kegiatan pembangunan.

Standar ini meliputi ruang lingkup, istilah dan definisi, persyaratan dan penyajian peta. Standar ini merupakan salah satu pedoman teknis kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian berbagai data serta informasi air.

- **SNI 19-6728.2-2002**

Penyusunan Neraca Sumber Daya – Bagian 2: Sumber Daya Hutan Spasial

Abstrak:

Standar Nasional Indonesia (SNI) Penyusunan neraca sumber daya – Bagian 2: Sumber daya hutan spasial ini merupakan penyempurnaan dan penyajian dalam format SNI dari petunjuk teknis neraca sumber daya hutan spasial yang dihasilkan pada tahun 1991 dan telah beberapa kali direvisi, terakhir direvisi pada tahun 2001.

Standar ini menentukan pedoman untuk penyusunan neraca sumber daya hutan spasial. Standar ini meliputi pendahuluan, ruang lingkup, acuan, istilah dan definisi, persyaratan, klasifikasi, metode dan penyajian peta.

- **SNI 19-6728.3-2002**

Penyusunan Neraca Sumber Daya – Bagian 3: Sumber Daya Lahan Spasial

Abstrak:

Standar Nasional Indonesia (SNI) Penyusunan neraca sumber daya – Bagian 3: Sumber daya lahan spasial ini merupakan penyempurnaan dari petunjuk teknis neraca sumber daya lahan spasial yang disusun sejak tahun 1991 dan telah beberapa kali dibahas dan direvisi terakhir kali pada tahun 2001.

Standar Nasional Indonesia Penyusunan neraca sumber daya lahan spasial ini dimaksudkan untuk memberi arahan atau bimbingan secara teknis bagaimana menyusun neraca sumber daya alam spasial khususnya sumber daya lahan untuk skala nasional, propinsi, maupun kabupaten/kotamadya.

Penyusunan neraca sumber daya lahan spasial meliputi ruang lingkup, acuan, istilah dan definisi, persyaratan, klasifikasi, metode, penyajian data spasial, sistematika penulisan. Klasifikasi sumber daya lahan mencakup penggunaan lahan, status penguasaan lahan, kawasan lindung dan budidaya. Penggunaan lahan yang aktual terkait dengan status pemilikan lahan dan berkembang pada kawasan lindung dan budidaya. Metode yang digunakan meliputi metode pengumpulan data, pengolahan data, dan metode pemetaan.

- **SNI 19-6728.4-2002**

Penyusunan Neraca Sumber Daya – Bagian 4: Sumber Daya Mineral Spasial

Abstrak:

Standar Nasional Indonesia (SNI) Penyusunan neraca sumber daya – Bagian 4: Sumber daya mineral spasial ini merupakan penyempurnaan dari petunjuk teknis neraca sumber daya mineral spasial nasional yang dihasilkan pada tahun 1991 dan telah mengalami 3 kali revisi masing masing tahun 1994, 1996 dan 2001.

Dalam Neraca sumber daya mineral terdapat informasi mengenai besarnya sumber daya/cadangan setiap jenis mineral, jumlah mineral-mineral yang telah dimanfaatkan dan cadangan yang masih tersisa (saldo) serta besarnya pembiayaan pemulihan lingkungan di dalam pelaksanaan eksploitasi (pemanfaatannya), yang kesemuanya bisa dikonversikan dalam nilai rupiah sesuai harga terbaru yang berlaku dari waktu ke waktu sesuai dengan tahun anggaran (APBD) kabupaten maupun kota.

- **SNI 19-6988-2004**

Jaring Kontrol Vertikal Nasional dengan Metode Sipatdatar

Abstrak:

Standar Nasional Indonesia (SNI) Jaring kontrol vertikal dengan metode sipat datar, disusun untuk pekerjaan pembangunan serta pengembangan jaring titik kontrol vertikal nasional dengan metode sipat datar yang berisikan klasifikasi, konvensi, spesifikasi teknis dan pedoman teknis pelaksanaan yang berlaku secara nasional.

- **SNI 19-7149-2005**

Jaring Kontrol Gayaberat

Abstrak:

Standar Nasional Indonesia (SNI) Jaring kontrol gayaberat berisi ketentuan-ketentuan meliputi klasifikasi, sistem referensi, ketelitian, monumentasi dan basis data yang berlaku secara nasional untuk pekerjaan pembangunan serta pengembangan jaring kontrol gayaberat.